

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ani Sri Rahayu, 2018, *“Pengantar Pemerintahan Desa”*, Sinar Grafika, Malang.
- Bayu Dwi Anggono, 2014, *“Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- Backtiar, 2015, *“Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada pengujian UU Terhadap UUD”*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Backy Krisnayuda, 2016, *“Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transpormasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*, Kencana, Jakarta.
- Fajar Laksono, Winda Wijayanti, dan Anna Trining, 2013, *“Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) / Rintisan Bertaraf Internasional (RSB)”*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Josef Mario Monteiro, 2016, *“Hukum Pemerintahan Daerah”*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Jimmy Z. Usfunan, 2021, *“Penafsiran Konstitusi”*, Fakultas Hukum Udayana.
- Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *“Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, Prenadamedia Group, Depok.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013, Bitra Indonesia, Medan.

- Maruarar Siahaan, 2011, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2012, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Prees, NTB.
- Muhadam Labolo, 2013, "*Memahami Ilmu Pemerintahn Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2015, "*Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*", Setara Press, Malang.
- _____, 2012, "*Dinamika Ketata Negaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*", UII Pres, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta.
- Rudiaji Mulya, 2012, "*Feodalisme dan Imperialisme di Era Global*", PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Suprianus Aristeus, 2020, "*Eksistensi dan Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Kemandirian Otonomi Desa*", Balitbangkumham Press, Jakarta Selatan.
- Sutoro Eko, 2015, "*Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*", Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*", Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Zainudin Ali, 2019, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal :

Ahmad Yani, "*Penataan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*", Jurnal Konstitusi, Volume 19 Nomor 2, 2022.

Amaliatulwalidain, "*Pemerintahan Desa dan Demokratisasi Pasca Orde Baru*", Journal of Public Administration and Local Governance Volume 6 Nomor 1, 2022.

Ali Marwan Hsb dan Hisar P. Butar Butar, "*Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 Nomor 4, 2016.

Andri Setiawan, Antikowati, Bayu Dwi Anggono, "*Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Oleh Mahkamah Agung*", Jurnal Legislasi, Volume 18 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021.

Ari setyono, "*Formulasi Pengharmonisan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Yang Dibentuk di Daerah*", Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 4 Nomor 2, 2019.

- Dian Ayu Widya K., Al Khanif, Antikowati, *“Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes”*, Jurnal Konstitusi, Volume 19 Nomor 2, 2022.
- Fatkhul Muin, *“Otonomi Daerah Dalam Prespektif Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah”*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, 2014.
- Firman, *“Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa”*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 23 Nomor 1, 2020.
- Ferry Irawan Febriansyah, *“Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”*, Jurnal Perspektif, Volume 21 Nomor 3, 2016.
- Femmy Silaswaty Faried, Suparwi, *“Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah”* Jurnal Supremasi, Volume 9, Nomor 2, 2019.
- Jefri S.Pakaya, *“Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah(The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy)”*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 Nomor 1, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *“Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik”*, makalah pada “Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-2: Menata Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara”, diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Padang, 2015.

- Lesmana Rian Andhika, *“Bahaya Patronase Dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak”*, Jurnal DPR RI, Universitas Padjadjaran, 2017.
- Maria Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, *“Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”*, Jurnal Creppido, Volume 1 Nomor 1, 2019.
- Muten Nuna, Moonti. Roy Marthen, *“Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sitem Demokrasi Di Indonesia”*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 4 Nomor 2, 2019.
- Muhadam Labolo, *“Peluang dan Ancaman Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”*, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Volume 7 Nomor 2, 2017.
- Nur Ainun, Mexsasai Indra, Dessy Artina, *“Rekonseptualisasi Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung Dikaitkan dengan Kedudukan Desa Sebagai Otonomi Asli”*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Riau, Volume 10 Nomor 2, 2021.
- Novianto M. Hantoro, *“Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara : Permasalahan Kategori Pejabat”*, Jurnal Negara Hukum, Volume 7 Nomor 2, 2016.
- Riza Multazam luthfy, *“Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Prespektif Konstitusi”* Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jilid 48 Nomor 4, 2019.

Riza Novandra, “*Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Dan 56/PUU-XIV/2016*”, *RechtIdee*, Volume 14 Nomor 2, 2019.

Sugiman, “*Pemerintahan Desa*”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 7 Nomor 1, 2018.

Sholahudin Al-Fatih, “*Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi*”, *Legality*, Volume 25 Nomor 2, 2018.

Yunanto, “*Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim*”, *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 7 Nomor 2, 2019.

Yusa' Farchan “*Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru*”, *Jurnal Adhikari*, Volume 1 Nomor 3, 2022.

Internet :

Andi Saputra, “*Kades Terpilih 4 Periode di Sumsel Terbentur UU Desa, BPD minta penjelasan ke MK*”, <https://news.detik.com/berita/d-5683200/kades-terpilih-4-periode-di-sumsel-terbentur-uu-desa-bpd-minta-penjelasan-ke-mk>, Diakses 17 April 2022.

Wida Kurniasih, “*Pengertian Periodisasi : Tujuan, Jenis-Jenis, dan Faktor Yang Mempengaruhi*”, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-periodisasi/#:~:text=Periodisasi%20adalah%20sebuah%20tingkat%20perkembangan,dilakukan%20karena%20adanya%20rentang%20waktu>. Diakses 15 April 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kepala

Desa.

Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara

Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.

